

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Ficker Hadjar dkk, *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : KRHN dan Kemitraan, 2003).
- Asshidiqie Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2004).
- _____, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005).
- _____, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Fuady Munir, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung : Aditama, 2009).
- Husein, Zainal Arifin, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013).
- HR. Ridwan , *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Dalam Paulus Efendi Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung : Alumni, 2004).
- Kurnia Titon Slamet, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sang Penjaga HAM (The Guardian of Human Rights)*, (Bandung : PT ALUMNI Bandung, 2013).
- Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005).
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya, 2004).
- Nazir Moh, *Metode Penelitian* , (Bogor : Ghalia Indonesia, 2013).
- Robert J. Reinstein & Mark C, Rahdert, *Reconstructing Marbury*, 57, (Arkansas : Law Review, 2005).
- Ruslan Rosady, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010).
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : MandarMaju, 2011).
- Soemitro, Rony Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998).

Siahaan Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006).

Sirait Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

Soemitro, Rony Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998).

Soemantri Sri, *Hak Uji Materiil di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1997).

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003).

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : ALFABETA, 2012).

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan ke-2 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998).

Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013).

Sutiyoso Bambang, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta : UII Press, 2009).

Syahuri Taufiqurrohman, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2011).

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik : Gagasan-Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009).

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

“Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 3.

Ajie Ramdan, “Problematika *Legal Standing* Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, Desember 2014, hlm. 738.

Andi Irman Putra, “Peran Prolegnas Dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional (Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasca Amandemen), Karya Ilmiah, Tahun 2008, hlm. 19.

Cindy Rizka Tirzani Koesoemo, “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penanganan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Article Lex Crimen*, Vol. 6, No. 1, Januari-Februari 2017, hlm. 62.

H. Ahmad Ubbe, “Instrumen Prolegnas Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Terencana dan Terpadu”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, hlm. 9.

Hamdan Zoelva. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Constitutional Complaint Dan Constitutional Question”, (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), hlm. 14.

_____, “Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi*, Vol. 3, No. 1, Maret 2006, hlm. 2.

I Dewa G. Palguna, “Constitutional Question : Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. 17 Januari 2010, hlm. 3

I Gusti Ngurah Santika, “Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 6, No. 1, Juni 2020, hlm. 27.

Idul Rishan, “Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 1, Maret 2021, hlm. 3

Laica Marzuki, “Judicial Review di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1 No. 3, November 2004, hlm. 2-3.

Mohammad Mahrus Ali, “Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, Nomor 1, Maret 2015, hlm. 176.

Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. XXVI, No. 2, Agustus 2011, hlm. 678

Nurul Qamar, “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi* Vol. I No. 1, November 2012, hlm. 2.

Retno Saraswati, “Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 2, No. 3, September – Desember 2013, hlm. 97.

Sopiani & Zainal Mubaroq, “ Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan “, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2, Juni 2020, hlm. 147-148.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Lain-lainnya

“Sejarah Berdirinya Mahkamah Konstitusi” www.mkri.id. Diakses pada 20 September 2021.

Zuhairan Yunni Yunan, “Revisi UU KPK Saat Ini Salah Arah. Ini 3 Hal Yang Harusnya Direvisi”, theconversation.com, diakses pada 27 Januari 2022, 14.30 WIB.

“Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” www.mkri.id. Diakses pada 24 September 2021.

“Sekilas KPK” Komisi Pemberantasan Korupsi. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-11-13. Diakses tanggal 30 September 2021.

“Ini 26 Poin dari UU KPK Hasil Revisi yang Berisiko Melemahkan KPK” nasional.kompas.com. Dipublikasi pada Rabu, 25 September 2019. Diakses pada 17 November 2021.